

## RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana relasi kuasa politik anggaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Supradesa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Bantarpanjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap tahun 2020-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, serta menggunakan perspektif institusionalisme dan pendekatan penelitian studi kasus. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan dua teknik pemilihan informan diantaranya adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Penulis menggunakan teori Michel Foucault terkait relasi kuasa yang membahas konteks kekuasaan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terjadi antara Pemerintah Desa Bantarpanjang dengan Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap dilatarbelakangi kepentingan dan tanggungjawab yang memiliki peran strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam hal pengelolaan anggaran desa pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Bantarpanjang melakukan perubahan APBDes yang memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk program-program penanggulangan Covid-19. Dalam pengelolaan anggaran desa terdapat interaksi aktor yang baik antara Pemerintah Desa Bantarpanjang yang kemudian didukung oleh Pemerintah Kecamatan Cimanggu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cilacap dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Karakteristik masing-masing lembaga tergantung dari tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 memunculkan pola relasi kuasa tidak setara atau relasi konflik, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun instruksi kementerian untuk mempercepat penanganan Covid-19 tidak memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa sehingga kewenangan Pemerintah Desa sangat terbatas. Dalam proses relasi kuasa terkait perubahan APBDes pada masa pandemi Covid-19 terdapat faktor pendukung yang *Pertama* adanya peraturan resmi dari pemerintah pusat yang mengharuskan Pemerintah Desa melakukan kebijakan penanganan Covid-19. *Kedua*, terdapat kerjasama yang baik Pemerintah Desa Bantarpanjang dan Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap. Sedangkan faktor penghambatnya yang *Pertama* peraturan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya membebani Pemerintah Desa Bantarpanjang karena program desa banyak yang tertunda. *Kedua*, Pemerintah Supradesa Kabupaten Cilacap kesulitan melakukan bimbingan secara langsung karena adanya pembatasan yang harus memperhatikan protokol kesehatan.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa, Politik Anggaran, Pemerintah Desa dan Pemerintah Supradesa, Pandemi Covid-19.

## SUMMARY

*The purpose of this study is to describe how the political power relations of the Village Government budget and the Supradesa Government are during the Covid-19 pandemic in Bantarpanjang Village, Cimanggu District, Cilacap Regency in 2020-2021.*

*The method used in this study is a qualitative method using a constructivism paradigm, as well as using an institutional perspective and a case study research approach. In selecting informants, researchers used two informant selection techniques including purposive sampling and snowball sampling. The collection of data used in this study was carried out using observation techniques, in-depth interviews, and documentation. While for the validity of the data using triangulation techniques. The author uses Michel Foucault's theory regarding power relations which discusses the context of power in Indonesia.*

*The results of this study indicate that the power relations that occurred between the Bantarpanjang Village Government and the Supradesa Government of Cilacap Regency were motivated by interests and responsibilities that have a strategic role, especially in carrying out public service duties in terms of village budget management during the Covid-19 pandemic. The Bantarpanjang Village Government made changes to the APBDes which prioritized the use of Village Funds for Covid-19 countermeasures programs. In managing the village budget, there is good actor interaction between the Bantarpanjang Village Government which is then supported by the Cimanggu District Government, the Cilacap Regency Village Community Empowerment Service and the Cilacap Regency Regional Secretariat. The characteristics of each institution depend on their main duties and functions. Management of Village Funds during the Covid-19 pandemic gave rise to a pattern of unequal power relations or conflict relations, because policies issued by the Central Government or ministerial instructions to accelerate the handling of Covid-19 did not give the Village Government the flexibility to manage the use of Village Funds so that the Government's authority Villages are very limited. In the process of power relations related to changes to the APBDes during the Covid-19 pandemic, there were supporting factors. First, there was an official regulation from the central government which required the Village Government to carry out a policy for handling Covid-19. Second, there is good cooperation between the Bantarpanjang Village Government and the Supradesa Government of Cilacap Regency. Meanwhile, the inhibiting factor is that the first regulation of the Central Government in its implementation is burdening the Bantarpanjang Village Government because many village programs have been delayed. Second, the Cilacap Regency Supradesa Government has difficulty conducting direct guidance due to restrictions that must pay attention to health protocols.*

**Keywords:** *Power Relations, Budget Politics, Village Government and Supradesa Government, Covid-19 Pandemic.*